

**PROSES SELEKSI INTERNAL CALON LEGISLATIF PARTAI NASDEM
DI DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

Analius Giawa

Karyawan Swasta

Gregorius Sahdan

Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta

ABSTRACT

This study discusses the selection process for legislative candidates in the Nasdem party of Yogyakarta City which can be said to have not gone well. Where is the political culture and modernization that occurs in a country, the extent to which egalitarian attitudes and changes in traditional habits are grounded, the election rules used in that country are majoritarian, combined or proportional, the use of gender quotas and the number of available legislative seats, request certain criteria desired by the internal party selectors, as well as the conditions of candidates who offered themselves who were deemed to meet the requirements greatly influenced the selection process. The recruitment process carried out by the NasDem party in obtaining the best candidates for legislative candidates in 2014 encountered various obstacles. This is due to the very low awareness and involvement of citizens in the importance of political activities.

Keywords: Political Party, Nasdem, Legislative

ABSTRAK

Studi ini membahas terkait dengan proses seleksi calon legislatif di partai Nasdem Kota Yogyakarta yang dapat dikatakan belum berjalan dengan baik. Dimana Budaya politik dan modernisasi yang terjadi pada sebuah negara, sejauhmana membuminya sikap egalitarian dan perubahan kebiasaan tradisional, aturan pemilu yang dipakai di negara tersebut apakah majoritarian, kombinasi atau proporsional, pemakaian kuota gender dan jumlah kursi legislatif yang tersedia, Permintaan kriteria tertentu yang diinginkan oleh para penyeleksi internal partai, serta kondisi kandidat yang menawarkan diri yang dianggap memenuhi syarat sangat mempengaruhi proses seleksi. Proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai NasDem dalam mendapatkan kandindat terbaik untuk calon anggota legislatif tahun 2014 mengalami berbagai kendala. Hal ini disebabkan karena kesadaran dan keterlibatan warga masyarakat yang sangat rendah terhadap pentingnya kegiatan politik.

Kata kunci: Partai Politik, Nasdem, Legislatif

1. PENDAHULUAN

Sampai saat ini, hampir semua partai politik mengalami masalah dalam proses seleksi calon anggota legislatif, di antaranya adalah: 1) masalah kualitas kandidat yang dinominasikan partai; 2) proses seleksi kandidat oleh partai; dan 3) keterlibatan pihak terkait dalam proses seleksi dan masalah pengambilan keputusan dalam menetapkan hasil-hasil seleksi oleh partai di level internal. Penelitian ini secara khusus mencoba menggali permasalahan-permasalahan tersebut dan menggambarkan bagaimana masalah tersebut dipecahkan oleh partai, khususnya oleh Partai NasDem. Sebagaimana diketahui bahwa penyelenggaraan pemilihan umum baik pemilihan presiden dan wakil presiden atau pemilihan anggota legislatif partai diharapkan mencalonkan kandidat yang berkualitas untuk menjadi anggota parlemen dan untuk menjadi presiden.

Pada pemilihan anggota legislatif tahun 2014 sesuai dengan SKKPU Nomor: 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 mengumumkan 10 (sepuluh) partai politik yang lolos dalam

verifikasi dan dinyatakan ikut sebagai peserta dalam pemilihan umum tahun 2014. Dari sepuluh partai yang lolos verifikasi tersebut Partai NasDem merupakan satu-satunya partai baru yang lolos dalam verifikasi KPU. Partai NasDem hadir dengan tujuan mengembalikan cita-cita luhur bangsa Indonesia yaitu menjadi bangsa yang mandiri, berdaulat dan sejahtera. Hal ini terlihat pada Manifesto Partai NasDem yang menegaskan bahwa "Partai NasDem berdiri untuk merestorasi cita-cita Republik Indonesia (AD/ART Partai NasDem, 2011:13).

Fungsi partai politik sebagaimana dikemukakan oleh Miriam Budiardjo (1981:16) bahwa adalah berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik. Rekrutmen politik dalam hal ini adalah proses mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam politik. UU Nomor 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik pada pasal 29 ayat (1) menerangkan bahwa Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi: (a) anggota partai politik; (b) bakal

calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (c) bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan (d) bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam wawancara Liputan6 kepada Sekjen NasDem Patrice Rio Capella pada tanggal 5 Maret 2013 menjelaskan bahwa ada 3 poin yang menjadi syarat utama bagi setiap warga negara agar lolos seleksi dan menjadi calon anggota legislatif di partai NasDem yaitu: 1) Tingkat popularitas; 2) Tingkat keterpilihan atau elektabilitas dan tidak tersangkut kasus hukum; 3) Memiliki dedikasi yang tinggi di daerah dipemilihannya. Oleh karena itu, proses seleksi diharapkan menjadi langkah nyata untuk mendapatkan kader-kader atau kandidat potensial dengan kualitas dan kapasitas yang baik. Proses seleksi calon anggota legislatif di masing-masing partai memiliki ciri khas tersendiri. Namun terdapat suatu kecenderungan bahwa individu-individu yang berbakat untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan mempunyai latar belakang yang sama, berasal dari kelas

menengah atau kelas atas dan kalaupun mereka berasal dari kelas bawah maka mereka merupakan orang-orang yang telah memperoleh pendidikan yang memadai (Haryanto 1982:47).

Dalam penjelasan Widodo Triputro selaku pengelola lembaga Pengkaderan Partai NasDem DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) DIY mengemukakan bahwa, “semula proses seleksi calon anggota legislatif di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten kota Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tolak ukur sebagai acuan team seleksi agar mampu melahirkan kader-kader yang berkualitas dan berintegritas yaitu sebagai berikut: 1) Tingkat pendidikan formal; 2) Pengalaman ke-legislatif-an atau aktifitas sejenis; 3) Pengalaman kepengerusan dalam partai NasDem; 4) Pengalaman Diklat Partai NasDem; 5) Pengalaman dalam organisasi/profesi non kepartaian; 6) Tingkat intensitas dalam aktifitas di Partai NasDem; 7) Masa keanggotaan dalam Partai NasDem; 8) Integritas menurut penilaian kolega dan lingkungan; 9) Kemampuan berkomunikasi dan menjaring aspirasi; 10) Popularitas

dalam masyarakat; dan 11) Potensi dukungan finansial terhadap Partai NasDem.

Menurut Norris dalam Katz dan Crotty (2006) sebagaimana yang dikutip didalam buku Sigit Pamungkas menyatakan bahwa terdapat empat hal penting yang dapat menunjukkan bagaimana pengorganisasian partai politik dalam rekrutmen politik yaitu: 1) Siapa kandidat yang dapat dinominasikan; 2) Siapa yang menyeleksi; 3) Dimana Kandidat di seleksi; dan 4) Bagaimana kandidat diputuskan.

Bagi Partai NasDem yang mengusung visi misi dan semangat restorasi, citra dan konsistensi partai akan teruji dalam keseriusannya dalam menjalankan fungsi-fungsi partai secara optimal dan profesional. Oleh karena itu, proses seleksi kader dalam partai memiliki kekhasan dan daya tarik untuk diteliti lebih mendalam. Pada penelitian ini penulis memusatkan pokok permasalahan dengan subyek dan obyek dari Partai NasDem dengan melihat proses seleksi internal calon legislatif yang dilakukan oleh partai pada pemilihan umum tahun 2014 di

tingkat Dewan Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta.

Berangkat dari masalah yang dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana proses seleksi internal calon legislatif partai NasDem pada Pemilihan Umum 2014 di Dewan Pimpinan Daerah kota Yogyakarta? Adapun fokus yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah proses seleksi di internal partai NasDem yang dilihat dari:

1. Kandidat yang dinominasikan partai
2. Proses seleksi yang dilakukan oleh partai NasDem
3. Keterlibatan pihak terkait dalam dalam proses seleksi
4. Proses dalam memutuskan dan menetapkan hasil-hasil seleksi oleh internal partai.

1.1. Perwakilan Politik

Kata perwakilan digunakan di Parlemen Inggris pada tahun 1583 oleh Thomas Smith. Secara umum konsep perwakilan digambarkan sebagai hubungan antara yang mewakili dan yang diwakili, namun perkembangan kehidupan politik mendorong adanya pemahaman baru yang lebih kompleks

terhadap makna perwakilan itu sendiri. Untuk memahami konsep perwakilan politik perlu dipahami dua teori klasik tentang hubungan wakil dengan terwakil (Sanit, 1985:37) yaitu: 1) Teori mandat; dan 2) Teori kebebasan.

Arbi Sanit (dalam Charles Simabura, dkk. 2009:14) mengemukakan bahwa perwakilan diartikan sebagai hubungan di antara dua pihak, yaitu wakil dengan terwakili dimana wakil memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan yang terwakili.

Aktor-aktor yang disebut sebagai perwakilan dari warga masyarakat merupakan representasi dari masyarakat untuk menjalankan peran sebagai kontrol dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang mengatur kehidupan bersama. Dalam Simabura, dkk (2009:14) menjelaskan bahwa Anggota DPRD merupakan wakil dari rakyat dan hendaknya melakukan tindakan berdasarkan kesepakatan yang dibuat dengan konstituen. Keberadaan perwakilan politik merupakan sebuah wadah untuk mewakili kepentingan anggota

masyarakat yang diwakilinya. Pitkin (dalam Sanit, 1985:194) mengemukakan bahwa keterwakilan politik (*political representativeness*) diartikan sebagai terwakilinya kepentingan anggota masyarakat oleh wakil-wakil mereka di dalam lembaga-lembaga dan proses politik. Jadi dapat dikatakan bahwa perwakilan politik adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendapat mandat untuk mewakili kepentingan-kepentingan konstituen dalam lembaga-lembaga perwakilan modern.

1.2. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik menurut Afan Gaffar (2006:155) adalah proses pengisian jabatan politik dalam sebuah negara, agar sistem politik dapat memfungsikan dirinya dengan sebaik-baiknya, guna memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Rekrutmen politik memiliki peran penting dalam menjaring personil-personil yang berkualitas. Dalam implementasinya, proses rekrutmen dilakukan secara terbuka, semi tertutup, bahkan secara tertutup. Dalam pandangan Gaffar (2006:170) bahwa rekrutmen politik

terbuka yang paling baik adalah melalui mekanisme Pemilihan Umum, yang dilakukan secara kompetitif dan demokratis.

Dalam Ramlan Surbakti (2010:150-151) menegaskan bahwa rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Dalam hal rekrutmen politik Lester Sligman (dalam Azani, 2010:18) mengatakan bahwa pola rekrutmen mencakup dua proses yaitu *pertama*, perubahan dari peranan non politik menjadi peranan politik yang berpengaruh; *kedua*, penetapan dan seleksi orang-orang untuk memegang peranan politik yang khusus.

Cumming dan Wise (dalam Noorsetyo, 2013:12) mengatakan bahwa dalam melakukan rekrutmen partai-partai politik dituntut untuk mendengarkan suara masyarakat juga ditunjukkan untuk memilih dan mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional. Bahkan dengan tegas Scarrow (dalam

Noorsetyo, 2013:12) mengatakan bahwa rekrutmen dan seleksi kandidat merupakan tugas yang krusial bagi partai politik, karena penampilan partai selama pemilihan dan pada saat menjabat lebih banyak ditentukan oleh bagaimana proses pemilihan kandidat dan kemana loyalitas mereka diikatkan. Oleh karena itu menurut pandangan Syamsuddin Haris (dalam Ade Setiawan, 2015:5) perekrutan anggota legislatif oleh partai politik secara umum mencakup tiga tahap penting yaitu:

- 1) Penjaringan calon, dimana dalam tahapan ini mencakup interaksi antara elite partai di tingkat desa/kelurahan atau ranting partai dengan elite partai di tingkat atasnya atau anak cabang.
- 2) Penyaringan dan seleksi calon yang telah dijaring. Tahapan ini meliputi interaksi antara elite tingkat anak cabang dan elite tingkat kabupaten/kota atau cabang/daerah.
- 3) Penetapan calon berikut nomor urutnya. Tahapan ini melibatkan antara elite tingkat cabang/daerah, terutama pengurus harian partai tingkat cabang/daerah dengan tim kecil yang

dibentuk dan diberikan wewenang menetapkan calon legislatif.

1.3. Seleksi Calon Legislatif

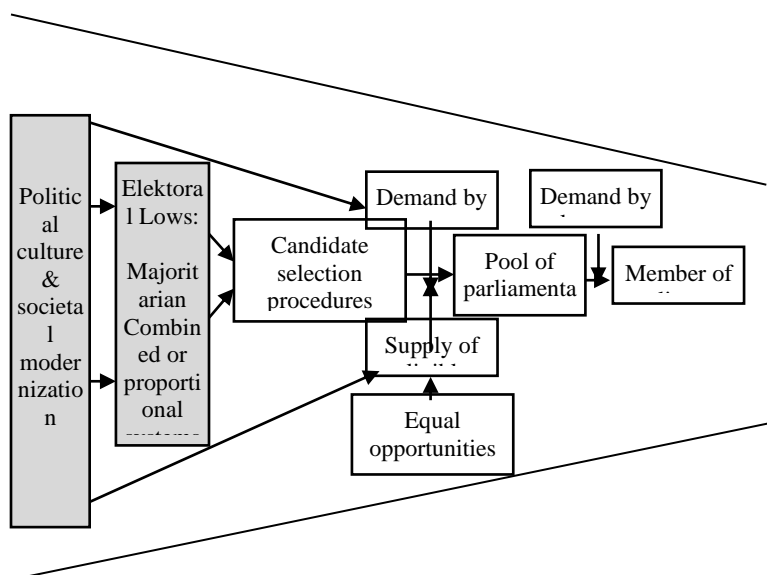
Seleksi politik memiliki pengaruh besar terhadap lahirnya para pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Miriam Budiardjo (2008:408) menegaskan bahwa rekrutmen politik sangat berkaitan dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal maupun kepemimpinan nasional. Untuk menguatkan nilai-nilai demokratisasi partai politik dalam seleksi calon legislatif dan pemimpin partai, Norris menyarankan untuk dilakukan desentralisasi proses pengambilan keputusan dengan mengikutsertakan para aktivis partai ditingkat akar rumput (*grass root activist*) (dalam Noorsetyo, 2013:12).

Norris mengajukan tiga tahap proses yang berjalan secara berurutan yaitu sertifikasi (*certification*) mencakup undang-undang pemilu, aturan partai dan norma-norma sosial yang secara informal membatasi kriteria-kriteria persyaratan pencalonan; nominasi (*nomination*) meliputi permintaan calon-calon yang

memenuhi persyaratan sesuai dengan yang diperlukan dan penawaran dari para selektor untuk menentukan siapa yang layak dinominasikan; dan pemilihan (*election*), tahap akhir penentuan siapa saja yang menjadi nominasi pejabat legislatif sebagaimana digambarkan dalam bagan berikut.

Gambar 1.1. *The “funnel” model of the candidate selection process*

Sumber: Norris (dalam Noorsetyo, 2013:13)



Norris (dalam Sugeng, 2014:6) menyatakan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi model seleksi kandidat legislatif sebuah negara yaitu:

- 1) Budaya politik dan modernisasi yang terjadi pada sebuah negara
- 2) Sejauhmana membuminya sikap egalitarian dan perubahan kebiasaan tradisional
- 3) Aturan pemilu yang dipakai di negara tersebut apakah majoritarian, kombinasi atau proporsional, pemakaian kuota gender dan jumlah kursi legislatif yang tersedia
- 4) Permintaan kriteria tertentu yang diinginkan oleh para penyeleksi internal partai
- 5) Kondisi kandidat yang menawarkan diri yang dianggap memenuhi syarat.

Dalam Konteks negara demokrasi proses seleksi menjadi komponen yang sangat penting. Hazan dan Rahat (dalam Sugeng, 2014:6) memandang bahwa metode seleksi calon sebagai komponen penting dalam demokrasi partai secara internal. Hal ini disebabkan oleh 3 hal yaitu:

- 1) Calon merupakan salah satu aktor utama yang menentukan arah kegiatan partai politik sehingga jadi salah satu pemegang kekuasaan dalam partai.
- 2) Seleksi calon juga merupakan komponen utama memahami evolusi

berbagai model organisasi partai yang berbeda.

- 3) Seleksi calon juga mempengaruhi faktor luar partai: pilihan yang dihadapi pemilih, komposisi badan legislatif, kohesi fraksi-fraksi di parlemen, kepentingan yang menonjol dalam perdebatan kebijakan, dan produk legislatif.

Proses seleksi terhadap wakil-wakil rakyat, perundang-undangan telah mengatur melalui UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik pasal 29 (1a) yang menerangkan bahwa: rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Proses Seleksi di Partai NasDem. Menurut Richard S. Katz (dalam Surbakti & Supriyanto, 2013:7) melihat bahwa seleksi kandidat merupakan salah satu fungsi khas partai politik dalam demokrasi.

2. METODOLOGI

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Nazir (dalam

Prastowo, 2014:186) metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Menurut pandangan Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2015:4) metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Bogdan dan Taylor, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).

Dalam pandangan Spdadley disebut *social situation* atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) (Prastowo, 2014: 199). Maka dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah proses seleksi di internal Partai NasDem terhadap calon anggota DPRD Kota Yogyakarta pada pemilu tahun 2014 yang berlokasi di DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Partai NasDem Kota Yogyakarta. Dalam menentukan informan menggunakan

teknik *purposive*, dimana informannya adalah:

1. Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Ketua DPD Partai NasDem Kota Yogyakarta.
3. Sekretaris DPW/DPD Partai NasDem Kota Yogyakarta
4. Team seleksi calon anggota DPRD Kota Yogyakarta Partai NasDem pada pemilu tahun 2014.
5. Orang-orang yang menjadi peserta seleksi calon DPRD Kota Yogyakarta di Partai NasDem (baik yang berhasil menang dan duduk di legislatif maupun yang tidak menang).
6. Beberapa kader dari DPD Partai NasDem Kota Yogyakarta.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya: 1) Observasi berupa pengamatan secara langsung di lapangan terhadap berbagai peristiwa yang terkait dengan penelitian; 2) dokumentasi yang berupa rekrutmen data yang berasal dari berbagai dokumen seperti peraturan tertulis, AD/ART, notulen rapat, dan lain-lain; 3) wawancara terhadap para informan

yang dipandu dengan interview. Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan teknik analisis interaktif model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman (Prastowo, 2014: 214) analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tahap-tahap dalam analisis interaktif Miles dan Huberman meliputi: 1) Proses Reduksi Data; 2) Proses Penyajian data (*data display*); dan 3) Penarikan kesimpulan atau verifikasi.

3. HASIL

3.1. Rekrutmen Politik Partai

NasDem Pada Pileg 2014

Proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai NasDem dalam mendapatkan kandindat terbaik untuk calon anggota legislatif tahun 2014 mengalami berbagai kendala. Hal ini disebabkan karena kesadaran dan keterlibatan warga masyarakat yang sangat rendah terhadap pentingnya kegiatan politik.

Dalam hasil-hasil wawancara terlihat bahwa beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya minat warga untuk terlibat dan menjadi calon pada partai NasDem pada pileg 2014 yaitu: (1) NasDem termasuk partai baru; (2) Belum memiliki basis massa; (3) Visi dan Misi partai belum teruji; (4) Belum memiliki tokoh publik (*public personage*) yang berpengaruh; (5) Jaringan partai yang masih terbatas; (6) Adanya dominasi elit partai sehingga proses rekrutmen tidak tranparansi dan demokrasi.

3.2 Seleksi Internal Calon Anggota Legislatif

Proses seleksi terhadap para calon anggota legislatif di partai NasDem bertujuan untuk mendapatkan kandidat yang berkualitas dan mampu menjalankan visi misi partai dengan baik dan bertanggungjawab. Agar proses seleksi berjalan dengan baik maka perlu ada tolak ukur yang jelas. Pengelola Pengkaderan Partai NasDem DIY, Widodo Triputro mengemukakan bahwa semula ada 11 kriteria atau standar dalam proses seleksi caleg di internal partai Nasdem pada pileg tahun 2014 sebagai berikut: 1) Tingkat

pendidikan formal; 2) Pengalaman ke-legislatif-an atau aktifitas sejenis; 3) Pengalaman kepengurusan dalam Partai NasDem; 4) Pengalaman Diklat Partai NasDem; 5) Pengalaman dalam organisasi/profesi non kepartaian; 6) Tingkat intensitas dalam aktifitas Partai NasDem; 7) Masa keanggotaan dalam Partai NasDem; 8) Integritas menurut penilaian kolega dan lingkungan; 9) Kemampuan berkomunikasi dan menjangkau aspirasi; 10) Popularitas dalam masyarakat; dan 11) Potensi dukungan finansial terhadap Partai NasDem.

Proses seleksi di internal partai NasDem mengalami disorientasi, semangat restorasi dan partai tanpa mahar sulit dilakukan dengan baik. Hal ini karena dalam proses seleksi belum berjalan sebagaimana idealnya. Seleksi internal yang dilakukan pada pemilihan umum calon anggota legislatif tahun 2014 mengalami beberapa kendala yaitu: 1) Dominasi elit di internal partai NasDem dalam mengambil keputusan; 2) Proses seleksi tidak terbuka; 3) Hasil seleksi tidak transparan; 4) Proses seleksi sampai pada penentuan nomor urut kandidat calon tidak melibatkan

semua komponen partai; 5) Adanya calon anggota legislatif lolos tanpa melalui proses seleksi yang transparan; 6) Munculnya disorientasi pengurus partai yang hanya berkeinginan untuk mendapatkan suara pada pileg 2014 dengan mengabaikan kualitas dan tidak melakukan tahap-tahap seleksi yang ketat

3.3. Proses Pendominasian Kandidat

Proses pendominasian kandidat merupakan salah satu tahap akhir dalam menentukan calon anggota legislatif yang telah lolos melalui tahap-tahap seleksi di internal partai. Oleh karena itu proses pendominasian membutuhkan tolak ukur yang mana harus berdasarkan regulasi partai dan atas kesepakatan bersama. Dalam penentuan nomor urut kandidat caleg partai NasDem pada pileg tahun 2014 masih belum memiliki tolak ukur yang jelas sehingga proses penentuan nomor urut kandidat hanya sebatas kehendak elit yang berkuasa. Kurangnya transparansi dan munculnya kepentingan kelompok elit juga mempengaruhi proses penentuan nomor urut kandidat. Faktor kedekatan kandidat dan dukungan

finansial ikut mewarnai proses penentuan nomor kandindat yang ikut dalam proses seleksi di internal partai NasDem daerah pemilihan Kota Yogyakarta pada pileg tahun 2014.

3.4. Team Seleksi Internal Partai NasDem

Kehadiran team seleksi dalam proses seleksi calon anggota legislatif di internal partai NasDem memiliki peran yang besar. Keberhasilan dalam mendapatkan kandindat yang berkualitas dipengaruhi kejelian dan kemampuan team seleksi dalam melakukan tahap-tahap seleksi bagi para calon. Namun pada proses seleksi kandindat calon anggota legislatif di internal Partai NasDem kekuasaan dari kelompok elit menyebabkan lembaga seleksi internal partai tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ini menyebabkan rangkaian proses seleksi sebagaimana konsep Norris dan tahap-tahap yang di internal partai pada penjelasan sebelumnya tidak dilaksanakan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

4.1. Simpulan

Dari deskripsi dan analisis tentang seleksi calon legislatif (DPRD) tingkat Kota Yogyakarta oleh Partai NasDem disimpulkan bahwa:

- 1) Proses seleksi calon anggota DPRD Kota Yogyakarta yang dilakukan di internal di Partai NasDem belum memiliki tolak ukur dan syarat-syarat yang jelas dan terukur dalam menentukan seorang kandindat.
- 2) Dalam proses penentuan hasil seleksi para calon legislatif di internal partai NasDem masih didominasi kelompok elit partai tanpa melibatkan pengurus secara keseluruhan.
- 3) Team seleksi formal belum difungsikan dengan baik tetapi justru team informal yang mendominasi dalam melakukan proses seleksi caleg di internal Partai NasDem.
- 4) Partai NasDem masih lebih mengutamakan tingkat kuantitas dan lebih berorientasi pada caleg yang hanya dijadikan sebagai *food gather* untuk memperoleh suara dari pada kualitas calon yang di usung oleh partai dalam mengawal pelaksanaan fungsi-fungsi legislatif.

5) Terjadinya distorsi nilai (*value*) di internal Partai NasDem yang tergambarkan dengan rendahnya komitmen dari elit-elit internal dalam menjalankan visi misi serta tujuan dasar dari Partai NasDem sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, berikut saran peneliti terhadap seleksi calon anggota legislative di internal Partai NAsDem;

- 1) Dalam melakukan proses seleksi caleg di internal Partai NasDem perlu ada syarat-syarat dan tolak ukur.
- 2) Dalam menentukan hasil seleksi calon anggota legislatif di interal partai perlu melibatkan semua kompeten di internal partai sehingga tidak di dominasi oleh elit tertentu.
- 3) Memfungsikan secara baik team seleksi formal sehingga hasil dari proses seleksi yang dilakukan di internal partai NasDem dapat dipertanggungjawabkan. Team seleksi juga sebaiknya diisi oleh orang-orang yang berkualitas dan memiliki integritas.

4) Partai NasDem harus memberi prioritas dan mengutamakan kualitas dari para caleg yang akan diusung pada pemilihan umum.

5). Pengurus dan simpatisan partai NasDem harus berkomitmen mengelola dan menjalankan fungsi partai sesuai dengan visi misi yang diatur dalam AD ART partai NasDem.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel., Verba, Sidney. 1990. *Budaya Politik. Tingkahlaku Politik dan Demokrasi di Lima Negara* (terjemahan. Sahat Simamora). Jakarta: Bumi Aksara.
- Azani, Muhammad. 2010. *Tesis. Rekrutmen Politik Caleg PKS dan Caleg Golkar dalam Pemilu Legislatif 2009 di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kaliaga Yogyakarta.
- Budiardjo, Miriam. 1981. *Partisipasi dan Partai Politik, Sebuah*

- Bunga Rampai*. Jakarta: PT Gramedia.
- Budiardjo, Miriam. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gaffar, Afan. 2006. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haryanto. 1982. *Sistem Politik. Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Kurniawan, Hamdan., dkk. 2014. *Data Hasil Pemilu 2014 Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: KPU DIY.
- Maleong, Lexy J. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Meyer, Thomas. 2012. *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).
- Najib, Muhammad., dkk. 2014. *Pengawasan Pemilu Problem dan Tantangan*. Yogyakarta: Bawaslu Provinsi DIY.
- Prastowo, Andi. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- Prasetyoningsih, Nanik. 2014. *Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia*. *Jurnal Media Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. Yogyakarta: UMY Yogyakarta.
- Sanit, Arbi. 1985. *Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.

- Shimabura, Charles., dkk. 2009. *Membangun Konstitusional Indonesia Membangun Budaya Sadar Berkomunikasi. Jurnal Konstitusi PUSaKO Universitas Andalas. Vol. II, No.1.* Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. [/JOMFISIP/article/download/7462/7](#)
136 . Diakses tanggal 2 Maret 2016.
- Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.
- Thoha, Miftah. 2012. *Birokrasi Pemerintahan dan Kekuasaan di Indonesia* (edit. Suraji). Yogyakarta: Thafa Media.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik.* Jakarta: Grasindo.
- Yudhi Prasetya, Imam. 2011. *Pergeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik. Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan., Vol. 1 No. 1.,* Universitas Maritim Raja Ali Haji. http://fisip.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2012/03/JURNAL-ILMU-PEMERINTAHAN-BARU-KOREKSI-last_36_46.pdf
Diakses tanggal 2 Maret 2016.
- Surbakti, Ramlan. & Supriyanto, Didik. 2013. *Seri Demokrasi Elektoral Buku 6. Mendorong Demokratisasi Internal Partai Politik.* Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Nasdem, Partai. 2011. *Buku Saku Partai Nasdem. Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga:* Jakarta.
- Sugeng. 2014. *Rekrutmen Politik Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Pada Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Pekanbaru.* JOM FISIP Vol. 2 No. 2 tahun 2015. Universitas Riau.jom.unri.ac.id/index.php

Indonesia, Republik. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801. Sekretariat Negara: Jakarta.

Indonesia, Repuplik. 2011. *Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189. Jakarta: Sekretariat Negara.

Taufik, Mohamad. 2013. *Caleg Kulon Progo 40 persen lulusan SMA* <http://www.merdeka.com/politik/caleg-kulon-progo-40-persen-lulusan-sma.html>. Akses: 2 Januari 2016.

P Putra, Yuda Manggala. 2013. *70 persen Caleg Gunung Kidul Lulusan SMA* <http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/13/09/10/msx500-70-persen-caleg-gunung-kidul-lulusan-sma>. Akses: 2 Januari 2016.

<http://www.dwiestiningsih.com>. Akses: 2 Februari 2016.